

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa:

- a. Desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator kemandirian daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,076 dengan signifikansi sebesar $0,484 > \alpha (0,05)$. Dari hasil pengujian ini dapat dikatakan kemampuan suatu daerah memiliki perwujudan desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah yang tinggi tentunya akan mendukung pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara mandiri akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang baik.
- b. Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang pengukurannya menggunakan indikator skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,161 dengan signifikasnsi sebesar $0,681 > \alpha (0,05)$. Hasil pengujian ini

tentunya mampu menjelaskan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas. Penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan adanya orientasi dari pemerintah daerah untuk menuju kepada *good government*. Artinya, semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur kirannya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Rendahnya opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah masih belum bisa mengelola keuangan daerah secara baik. Baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu daerah tentunya tidak terlepas dari beberapa indikator seperti kinerja pemerintah daerah, kemandirian daerah, SDM, ketergantungan pada pemerintah pusat serta indikator-indikator lainnya. Dari penelitian ini, peneliti telah melakukan pengujian dengan menjadikan indikator kemandirian daerah dalam desentralisasi fiskal dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai variabel yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini jelas menunjukkan bahwa kedua indikator ini berpengaruh secara signifikan

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil inilah yang kiranya dapat dipakai oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota pada provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan evaluasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Peneliti selanjutnya di harapkan mampu memperluas cakupan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perlu juga dipertimbangkan untuk penggunaan proksi desentralisasi fiskal dalam konteks yang berbeda, atau bahkan dalam lingkup lintas disiplin ilmu misalnya ekonomi dan politik agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- BPK. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- BPS NTT. 2016. *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka*. Pusat Informasi Badan Pusat Statistik NTT.
- Erlina, Omar dan Rusdianto, (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Fontanella, A. dan H. Rossieta. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Di Indonesia* Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Ghozali, Imam.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal.(2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: STIM YKPN
- Atriana, Jefri.(2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sulawesi Tenggara*. Semarang, Universitas Sultan Agung
- Mudhofar, Kurniatur. Dan Tahar, Afrizal. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Prodi Akuntansi Universitas Muhamadiyah. Yogyakarta
- Nazir. Moh , Ph.D (2014). *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007) *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi : Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, Bank Dunia L Justice for the poor Project

Syahrudin, 2006. *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten* . Skripsi, Universitas Andalas.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008* tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.